

STRATEGI PEMERINTAH DESA BATU TERING DALAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2022-2023

Dewi Setiawati¹, Dedi Supriadi, M.Si²

¹Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

dedi.supriadi@uts.ac.id

ABSTRAK

Pembinaan dan pemberdayaan adalah upaya untuk membantu pertumbuhan pembangunan ekonomi hingga kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan mandiri. Saat ini Desa Batu Tering mengalami masalah pada kulrangnya kelsadaran dan partisipasi masyarakat Delsa, kulrangnya aksels telrhadaap modal dan telknologi hingga keltelrbatasan sulmbelr daya baik itul dana maulpauln telnaga manulsia maupun serta adanya anggaran yang di alokasikan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa yang telah tertuang dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Maka dari itu perlu untuk mengetahui sejauh mana kemudian strategi pemeritnah desa dalam memperbaiki masalah tersebut dengan upaya pembinaan dan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode dan tipe peneltian kualitatif dekriptif. Melalui hasil penelitian, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batu Tering dalam pembinaan dan pemberdayaan sudah di lakukan dengan baik dan efektif terhadap masyarakat. Hal ini dilihat dari program yang dilaksanakan selalu melibatkan mayarakat dan mengutamakan adanya keberdayaan masyarakat, sehingga saat ini Desa Batu Tering telah di tetapkan menjadi Desa Mandiri (Desa yang mengedepankan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya local dan meningkatkan kesejahteraan) dan Desa Inklusif (Konsep pembangunan desa yang bertujuan untuk mendorong keberagaman dan keterlibatan sosial di antara semuaarganya). Tetapi ada beberapa hambatan yang di lalui oleh Pemerintah Desa yakni infrastruktur jalan menuju Desa Batu Tering yang masih rusak sehingga pengunjung maupun wisatawan susah mengaksesnya, dan juga banyak potensi desa yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat tetapi anggaran yang belum memadai.

Kata kunci; Pemerintah; Pembinaan; Pemberdayaan; Masyarakat; Strategi.

ABSTRACT

Guidance and empowerment are efforts to help the growth of economic development so that the quality of society becomes better and more independent. Currently, Batu Tering Village is experiencing problems with the lack of awareness and participation of the Delsa community, the lack of access to capital and technology and the limitations of human resources, both in terms of funds and human resources and also the budget allocated for community development and empowerment by the village government which has been stated in RPJMDes, RKPDes and APBDes. Therefore, it is necessary to know to what extent the village government's strategy is to improve this problem with coaching and empowerment efforts. This research uses descriptive qualitative research methods and types. Through research results, the strategy implemented by the Batu Tering Village Government in coaching and empowering has been carried out well and effectively for the community. This can be seen from the programs implemented that always involve the community and prioritize community empowerment, so that currently Batu Tering Village has been designated as an Independent Village (a village that prioritizes community participation and independence in managing local resources and improving welfare) and an Inclusive Village (Concept village development which aims to encourage diversity and social involvement among all its residents). However, there are several obstacles faced by the Village Government, namely the road infrastructure to Batu Tering Village which is still damaged so it is difficult

for visitors and tourists to access it, and there is also a lot of village potential that could be utilized for community empowerment but the budget is not yet adequate.

Keywords; Governmen;, Coachin; Community; Empowermen;, Strategy.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa mendasarkan asas otonomi. Dalam hal ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun fungsi pemerintahan yang lain seperti pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat desa maka diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan yang optimal. Undang-undang Desa lahir untuk memperkuat pemerintahan Desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan pada Desa. Desa yang dimaksud bermakna desa, Desa sebagai pemerintahan terkecil dan Desa sebagai masyarakat warga. Jantung utama arah pembangunan Desa sesuai dengan tujuan dibuatnya undang-undang Desa dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga, ditunjukkan oleh kualitas masyarakat Desa dan program-program yang dikembangkan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu Desa atas dasar partisipasi masyarakat Desa dalam setiap kegiatan. Tata pemerintahan Desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan untuk menggerakkan, mengubah cara pandang, dan mewujudkan tujuan kegiatan secara berkelompok akan lebih mudah. Namun pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa bimbingan atau peran pemerintah daerah. Saat ini pemberdayaan di Indonesia nyatanya belum dapat merata di berbagai daerah.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah Strategi Pemerintahan Desa Batul Tebing. Desa Batul Tebing merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sulbawa. Secara geografis Desa Batul Tebing terletak di wilayah selatan, yang memiliki potensi sumber daya alam yang luas wilayah 6.655,92 km² dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani/peternak sebanyak 38,95%. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah penggunaan tanahnya yang digunakan untuk lahan pertanian. Mayoritas masyarakatnya hanya bergantung pada hasil panen sehingga kerap mengalami kesulitan ketika hasil panen yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, Pemerintahan Desa Batul Tebing melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pemberdayaan lembaga kelompok (PKK), pelatihan pembuatan kain tenun tradisional, pemberdayaan kelompok pemuda, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan ekonomi produktif masyarakat. Selain itu, Desa Batul Tebing juga memiliki potensi pariwisata yaitu keindahan alam, situs sejarah dan budaya lokal yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa Batul Tebing juga merupakan Desa Inklusif atau Desa yang melindungi hak-hak disabilitas dan kaum perempuan. Artinya bahwa pembinaan dan pemberdayaan ini dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental dan tidak memandang jenis kelamin yang berarti Desa ini memahami dan peduli terhadap kesetaraan gender. Akan tetapi yang terjadi tingkat pemerintahan terendah yaitu di Desa Batul Tebing, justru adanya tantangan dan masalah yang signifikan yang menyangkut kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa, kurangnya akses terhadap modal dan teknologi hingga keterbatasan sumber daya baik itu dana maupun tenaga manusia. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk program

pelmbinaan dan pelmbelrdayaan masyarakat juga telah telrtulang dalam RPJMDels pelriodel 2020-2026 dan RKPDEls pada tahun 2022. Hal ini belrdasarkan hasil obselrvasi dan wawancara delngan Kelpala Delsa Batul Telring yaitul Bapak Alwan Hidayat, S.Pdi. Oleh karelna itul, idelalnya Pelmelrintah Delsa melmbelrikan stratelgi yang yang dapat melngatasi masalah yang telrselbult. Dari ulraian latar bellakang diatas, maka pelnullis telrtarik mellakukan pelnellitian yang belrjudull “**Strategi Pemerintah Desa Batu Tering Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022-2023**” delngan harapan dapat diidelntifikasi masalah yang dihadapi selrta melnelmulkan stratelgi yang elfelktif dalam melnngkatkan pelmbinaan dan pelmbelrdayaan masyarakat, melmpelrkaya litelratulr, pelngelctahuln selrta wawasan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi-fungsi Manajemen

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen.

Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC; Yaitu: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan/ pengarahannya) dan controlling (pengendalian).

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan ialah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Menurut Koontz O’Donell, dalam Principles of Management, planning is the most basic of all management functions since it involves selection from among alternative courses of action. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling dasar karena manajemen meliputi penyeleksian di antara bagian pilihan dari tindakan.

2. Organizing (pengorganisasian)

Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya, sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama secara jelas diatur siapa menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, arus komunikasi, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan.

3. Actuating (penggerakan/pengarahannya)

Penggerakan/pengarahannya adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan-karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan lainnya.

4. Controlling (pengendalian/pengawasan)

Pengawasan/pengendalian adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi ke arah tujuan yang ditetapkan. Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selain itu, Setiawan (2003:44) juga mengatakan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan kesuksesan dan kegagalan pembangunan masyarakat. Faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasannya:

1. Faktor Internal

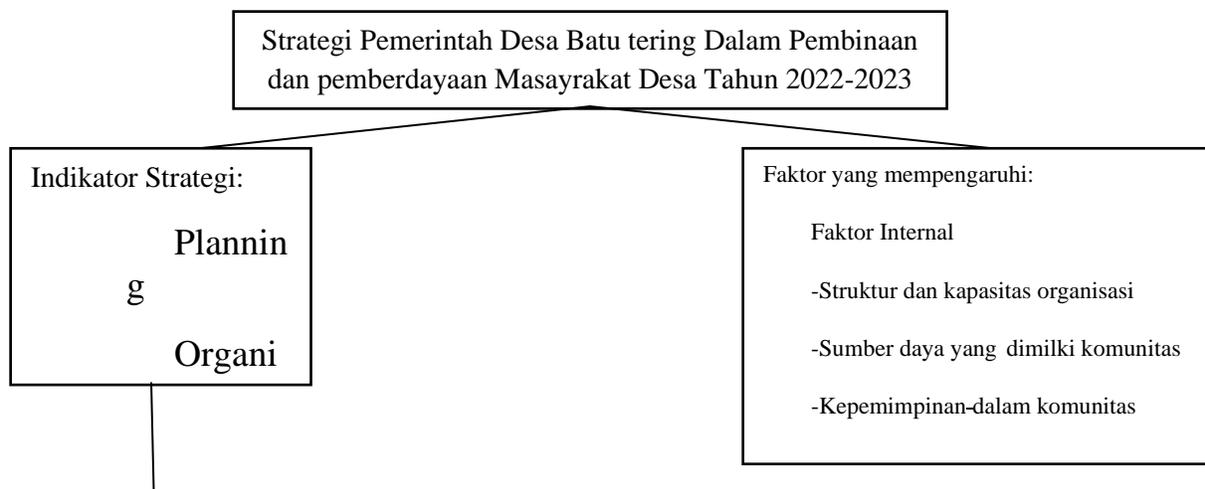
Faktor ini merupakan faktor dari dalam lingkungan atau unit yang kemudian memerikan pengaruh dalam program pembangunan masyarakat. Faktor ini dapat dijabarkan sebagai hal yang meliputi empat hal, yakni: sejarah komunitas, berkaitan dengan struktur dan kapasitas organisasi, terkait dengan sumberdaya yang dimiliki komunitas, dan berkaitan dengan kepemimpinan dalam komunitas itu sendiri.

2. Faktor Eksternal

Sedangkan untuk faktor eksternal dikatakan sebagai faktor yang berasal non unit yang kemudian memberikan berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat setempat. Faktor ini kemudian memberikan dua aspek yang mempengaruhi pemberdayaan yaitu menyangkut sistem sosial politik makro dimana komunitas berada, dan berkaitan dengan ada atau tidaknya agen-agen perantara yang dapat menjadi penghubung antara komunitas dengan dunia atau pihak-pihak luar.

C. Kerangka Penelitian

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat

3. METODOLOGI

A. Waktu dan Tempat

Untuk memperoleh data sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan dilakukan di tempat yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Desa Batu Teiring, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sulbawa. Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan kegiatan penelitian serta pengamatan bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar peneliti bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan rumusan masalah dengan menggunakan teori yang sudah diteliti oleh peneliti. Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, pada tahun 2023.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, yang dalam hal ini, dengan tujuan untuk melakukan pengamatan. Peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu di Desa Batu Teiring untuk melihat fakta lapangan yang akan dicocokkan dengan hasil wawancara dan informasi yang telah dihimpun dari subjek penelitian. Melalui observasi akan membantu penulis lebih objektif dalam menilai strategi Pemerintah Desa Batu Teiring dalam pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengajuan pertanyaan kepada subjek penelitian dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan situasi dan keadaan selama proses wawancara berlangsung. Peneliti akan berusaha menghimpun sebanyak informasi tentang strategi Pemerintah Desa Batu Teiring dalam pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa berikut dengan faktor yang mempengaruhinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan peneliti dalam hal ini adalah peninggalan tertulis dan mengambil gambar atau foto-foto dan hukum-hukum yang termasuk dalam masalah peneliti. Peneliti akan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui dokumen di kantor Desa Batu Teiring maupun dokumen yang memiliki kaitan, seperti buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Penulis juga akan mengumpulkan data (foto) kegiatan-kegiatan di Desa Batu Teiring yang telah dilakukan pemerintahan desa dan data berupa foto pada saat wawancara bersama informan penelitian di Desa Batu Teiring.

C. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010:338) reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data penelitian yang diperoleh akan memberikan gambaran keadaan yang lebih faktual.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah setelah reduksi data, data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono, 2010:341). Penyajian data ini merupakan kumpulan data dari informan untuk proses penarikan kesimpulan. Dengan memahami sajian data penulis akan mengetahui apa yang sedang terjadi dan seharusnya dilakukan untuk menganalisis dan mengambil tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menjadi temuan baru yang belum ada sebelumnya. Dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah diteliti, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Batu Teiring adalah Desa yang terletak di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Desa ini terletak di ketinggian 48 Mdpl dengan luas wilayah kurang lebih 7,66 KM atau 3,3% dari luas total wilayah Kecamatan Moyo Hulu. Penggunaan lahan di Desa Batu Teiring sampai tahun 2019 terbagi dalam beberapa kategori penggunaan meliputi lahan sawah (irigasi teknis, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis dan tadah hujan, lahan kering (kebun, ladang, hutan rakyat,dll), hutan negara, pemukiman/pekarangan dan lahan penggunaan lainnya. Desa Batu Teiring sampai dengan Desember 2019 memiliki 563 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 1.845 jiwa yang terdiri dari 916 Laki-Laki dan 929 Perempuan.

B. Data Informan

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti yakini sebagai pihak yang bisa memberikan data menyangkut fokus dari penelitian tersebut yang diperoleh melalui teknik *purposive/snowball sampling*. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa representasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa

3. Tokoh Masyarakat
4. Tokoh Adat
5. Tokoh Agama
6. Karang Taruna
7. PKK

C. Strategi Pemerintah Desa Batu Tering Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022-2023

1. Planning (Perencanaan)

Pemerintah Desa Batu Tering memiliki strategi yang kuat dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka melaksanakan proses perencanaan yang sistematis untuk mencapai tujuan ini. Langkah-langkah yang mereka tempuh mencakup musyawarah dusun, musyawarah desa, penyusunan RPJMDesa, RKPDes, dan APBDes. Dalam setiap tahap perencanaan, pemerintah desa secara konsisten melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Adapun kegiatan yang di rencanakan pada MusrebangDes ialah Pembinaan PKK dengan membuat yogurt dan minuman jahe, pembinaan pemuda dengan pelatihan tenun, Desa Inklusi dengan Pelatihan jurnalisme, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Dalam keseluruhan strategi pembinaan dan pemberdayaan ini, pemerintah desa juga memiliki peran sebagai fasilitator dan penggerak. Mereka tidak hanya memberikan program-program dan layanan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat penting, karena mereka adalah pihak yang langsung terlibat dan memiliki kepentingan dalam pengembangan desa mereka sendiri. Dengan demikian, strategi pemerintah Desa Batu Tering dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat mencakup pengorganisasian pada lembaga masyarakat yang telah memiliki tanggung-jawab masing-masing yakni PKK bertanggung-jawab dalam kegiatan pembinaan PKK, kemudian LPM bertanggung-jawab dalam kegiatan pelatihan jurnalisme, dan Karang taruna bertanggung-jawab dalam kegiatan pelatihan tenun. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan pengorganisasian melalui agen perantara di desa, seperti RT, RW, Kepala Dusun, dan agen peranta internal lainnya.

3. Actuating (Pelaksanaan/peinggerakan)

Hal konkrit yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Tering di antaranya ialah terbentuknya wadah ekonomi masyarakat (UMKM) seperti pengelolaan susu yogurt dan minuman jahe, pembinaan di bidang pemuda dan olahraga (pelatihan menenun), kegiatan keagamaan, kegiatan kewanitaan (PKK), kegotong-royongan, kebudayaan, pengadaan alat,

pengelolaan dan kandang untuk peternakan, dan pengadaan fasilitas umum (pengadaan tempat pembuangan sampah). Hal ini tidak luput dari pengalokasian dana oleh Pemerintah Desa Batu Tering dalam rangka mendukung pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Controlling (Pengawasan)

Pada tingkat desa, pengontrolan dilakukan oleh BPD. Selain melakukan pengawasan dan kontrol di lapangan, BPD juga memiliki fungsi sebagai forum musyawarah dalam pengambilan keputusan. Mereka mewakili kepentingan masyarakat desa dan berperan sebagai pihak yang memberikan masukan, saran, dan pertimbangan dalam kebijakan yang akan diambil. BPD menjadi wadah untuk berdiskusi, berdebat, dan mencapai mufakat dalam kepentingan bersama. Kemudian Pemerintah Desa melakukan proses pelaporan pertanggungjawaban setiap 6 bulan memiliki tujuan utama untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan mempertahankan hasil kerja yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, Pemerintah Desa berharap dapat terus meningkatkan kualitas masyarakat, serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi. Secara keseluruhan, pengukuran kinerja dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan inspektorat merupakan langkah yang penting dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa. Dengan adanya penilaian dari tingkat yang lebih tinggi, akan tercipta akuntabilitas yang lebih baik serta kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem pemerintahan desa.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menjalankan strategi, tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi Pemerintah Desa Batu Tering dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa Batu Tering :

1. Faktor internal

a. Struktur dan kapasitas organisasi

Pemerintah Desa Batu Tering memiliki struktur kelembagaan yang menanggung-jawabi pembinaan dan pemberdayaan, yakni kepala urusan pelayanan dan kepala urusan kesejahteraan. Dengan adanya struktur tersebut, Pemerintah Desa Batu Tering dapat lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga membantu dalam membangun ikatan sosial dan kebersamaan antarwarga. Keberhasilan lembaga kemasyarakatan bergantung pada partisipasi aktif dan kolaborasi semua pihak yang terlibat. Selain itu Pemerintah Desa juga melakukan langkah-langkah yaitu pertama, pemerintah telah mengalokasikan dana dalam anggaran desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa. Langkah ini penting karena dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, mereka akan lebih mampu menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat desa. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan

aparatus Pemerintah Desa Batu Tering, mayoritas hanya lulusan SMP. Akan tetapi, mereka dipilih berdasarkan dari pengalamannya, karena mereka sudah menjabat semenjak dari kepala desa sebelumnya.

b. Sumber daya yang dimiliki komunitas

Di Desa Batu terdapat sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat, diantaranya ialah, sumber daya manusia, sumber daya anggaran (Total sumber daya anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa ialah Rp. 286.291.700,00) ,dan sumber daya infrastruktur. Dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, komunitas Desa Batu Tering dapat melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat, melakukan perencanaan yang terpadu, serta menjaga keterbukaan dan inklusivitas. Dengan demikian, sumber daya internal ini dapat dioptimalkan dan mendukung pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batu Tering.

c. Kepemimpinan dalam komunitas

Kepala Desa Batu Tering menerapkan kepemimpinan demokratis. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Meskipun prosesnya dapat lebih lambat, namun dampaknya bisa lebih positif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. Faktor Eksternal

a. Sistem sosial politik makro

Dalam konteks sosial politik makro, pendekatan terhadap masyarakat dapat berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga stabilitas dalam sebuah komunitas. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara masyarakat, penggabungan dan fokus pada satu tujuan yang sama membantu mencegah pecahnya polarisasi.

b. Agen-agen perantara

Pentingnya peran agen-agen perantara seperti LLK (Lembaga Latihan Kerja) dan pihak lain dalam pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melibatkan mereka, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat lebih terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan kondisi lokal serta kebutuhan yang sebenarnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batu Tering dalam pembinaan dan pemberdayaan sudah dilakukan dengan baik dan efektif terhadap masyarakat. Hal ini dilihat dari program yang dilaksanakan selalu melibatkan masyarakat dan mengutamakan adanya keberdayaan masyarakat, sehingga saat ini Desa Batu Tering telah ditetapkan menjadi Desa Mandiri (Desa yang mengedepankan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan) dan Desa Inklusif (Konsep pembangunan desa yang bertujuan untuk mendorong keberagaman dan keterlibatan sosial di antara semua warganya). Tetapi ada beberapa hambatan yang dilalui oleh Pemerintah Desa yakni infrastruktur jalan menuju Desa Batu Tering yang masih rusak sehingga pengunjung maupun wisatawan susah mengaksesnya, dan juga

banyak potensi desa yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat tetapi anggaran yang belum memadai.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfatih, A. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bandung: Unpad Preiss.

Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta

Djamin, Awaludin, (2004), Penetapan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Polri. Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Parsudi Suparlan (Ed) Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Moleong, L.J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Rosmeidi dan Riza Risyanti. (2006). Pemberdayaan Masyarakat. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.

Bandung: Alfabeta

Sumidiningrat, Gunawan (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta:

Gramedia

Jurnal & Skripsi

Hasdiki. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Alami Di Desa Kaloling Kabupaten Bantaeng. *Journal of Government Studies*, Vol.1 No.2.

Juisniaty. (2019). Strategi dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, Vol 10. No. 02.

Manurung, D. S. (2020). Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pembinaan BUMDES Di Kabupaten Sebang Beidagai Provinsi Sumatera Utara . *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 1-12.

Pramadani, D. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa New Normal Di Desa Cakura Kabupaten Takalar. *Universitas Bosowa*.

Putra, R. H. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri. *Universitas Lampung*.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dokumen lainnya

Profil Desa Desa Batu Tering Tahun 2020

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batu Tering Tahun 2020-2026

Rencana Kerja Pemerintah Desa Batu tering Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Tering Tahun 2022